

Strategi Aliansi Pemerintah Taiwan Terhadap Ancaman Keamanan Republik Rakyat China Tahun 2018

Salsabila Putri¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
20160631260007@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

This journal analyzes and describes what strategies are prepared by Taiwan to deal with threats from China. In this case, China has ambitions to regain control of Taiwan which they consider as part of its sovereignty. While Taiwan itself considers that they are an independent country. This study aims to see Taiwan's strategy in dealing with security threats from China. This research methodology uses descriptive qualitative research with a framework of thinking using the concept of Bandwagoning. By using this concept, it can be seen that Taiwan uses an alliance with the US to counter security threats from China. The strong form of the alliance between the two can be seen in the establishment of the Taiwan Relations Act (TRA) Security Agreement which is applied in the security agreement where the US is committed to protecting Taiwan from Chinese military attacks and selling weapons to Taiwan to ward off security threats from China.

Keywords: Taiwan, China, TRA, Threat, Alliance.

ABSTRAK

Jurnal ini merupakan analisis dan deskripsi tentang strategi apa yang disiapkan oleh Taiwan untuk menghadapi ancaman dari China. Dalam hal ini, China berambisi untuk menguasai Kembali Taiwan yang oleh mereka dianggap sebagai bagian dari kedaulatannya. Sedangkan Taiwan sendiri menganggap bahwa mereka adalah negara yang merdeka. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana strategi Taiwan dalam menghadapi ancaman keamanan dari China. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan kerangka pemikiran menggunakan konsep Bandwagoning. Dengan menggunakan konsep ini, dapat diketahui bahwa Taiwan menggunakan cara aliansi dengan AS untuk melawan ancaman keamanan dari China. Adapun bentuk kuat dari aliansi diantara keduanya bisa dilihat dari dibentuknya perjanjian keamanan *Taiwan Relaction Act* (TRA) yang diaplikasikan dalam perjanjian keamanan dimana AS berkomitmen melindungi Taiwan dari serangan militer China serta melakukan penjualan senjata kepada Taiwan untuk menghalau ancaman keamanan dari China.

Kata Kunci: Taiwan, China, TRA, Ancaman, Aliansi.

PENDAHULUAN

Secara historis, koneksi Taiwan dengan China Daratan berawal saat wilayah ini ditemukan pertama kali pada 230 ketika periode Three Kingdoms (220-280). Setelah Dinasti Sui (586-618) dan Dinasti Tang (618-907) mengokohkan penguasaan China di wilayah yang semula bernama Pulau Yizhou itu, pada masa Dinasti Song (960-1279) dan Dinasti Yuan (1271-1368), imigran beretnis Han yang mayoritas berasal dari Provinsi Fujian mulai berdatangan ke Taiwan (Taiwan Affairs Office of the Chinese State Council 1998). Pada era Dinasti Song, China aktif menjalankan hubungan perdagangan dengan Jepang serta negaranegara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun, situasi berbalik saat Dinasti Ming berkuasa (1366-1644). Menurut Wills dalam Murray (1999)

yang dikutip oleh Mubah (2014), pemerintahan Ming menarik para pejabatnya dan mengevakuasi imigran China dari Taiwan. Aktivitas maritim di wilayah itu pun dihentikan. Pada saat bersamaan, imperialisme Eropa sedang menyebar ke Asia. Ketika China Daratan mengalami pergantian kekuasaan dari Dinasti Ming ke Dinasti Qing (1644-1911), Taiwan telah diduduki oleh Belanda melalui kongsi dagangnya, Dutch East India Company (1624-1662).

Belanda memanfaatkan Taiwan sebagai basis pasarnya untuk mempertemukan para pedagang dari negara kolonial ini dengan China dan Jepang. Merasa dieksploitasi oleh Belanda, penguasa Dinasti Ming menyerbu Taiwan dan merebut wilayah ini pada 1662. Dua puluh satu tahun kemudian, kekuasaan Ming di Taiwan diruntuhkan oleh Dinasti Qing. Menurut Wang (2009) yang dikutip oleh Mubah (2014), pemerintahan Qing mengelola Taiwan dengan baik. Pada waktu itu, populasi Taiwan meningkat drastis seiring kian gencarnya program imigrasi yang dilakukan. Shepherd (1993) dan Mubah (2014), jumlah penduduk Taiwan yang pada 1650-an hanya sekitar 100 ribu jiwa, melonjak tajam hingga 1,78 juta orang pada 1824. Di kala Taiwan kian menunjukkan perkembangan berarti, penguasa Qing semakin memberikan perhatiannya pada pulau ini.

Namun, upaya itu kerap terganggu oleh intervensi kekuatan asing dari Eropa yang ingin menguasai China khususnya, dan Asia pada umumnya. Perang Candu (1856-1860) yang dilancarkan Inggris dan Perancis semakin melemahkan kekuasaan Dinasti Qing. Walaupun kedua negara Eropa itu pernah mendaratkan pasukannya ke Pulau Taiwan, tetapi militer China berhasil mengusirnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Jepang yang berhasil merebut Taiwan melalui Perjanjian Shimonoseki (1895). Hingga 1945, Taiwan digunakan Jepang sebagai basis militer untuk mengirimkan pasukan ke Asia Tenggara. Selain itu, Jepang secara masif dan represif mencerabut akar budaya masyarakat Taiwan dengan melancarkan program Jepangisasi, menurut Wang (2009) yang dikutip oleh Mubah (2014).

Tindakan represif selama 50 tahun itulah yang lantas, dalam beberapa hal, mengubah pandangan rakyat Taiwan atas China Daratan. Karena itu, ketika Jepang takluk dalam Perang Dunia II dan dipaksa untuk menyerahkan kembali Taiwan ke China pada 1945, tidak semua rakyat Taiwan mendukung pemerintahan Nasionalis yang tengah berkuasa di China Daratan. Apalagi, pemerintahan Nasionalis ternyata tidak terlalu mempedulikan kehidupan rakyat Taiwan. Alih-alih mengelola pulau yang kembali ke pangkuan itu dengan baik, pemerintahan Nasionalis lebih disibukkan oleh perang saudara dengan kaum Komunis. Akibatnya, dalam diri sebagian rakyat Taiwan, muncul perasaan tidak suka dengan China yang lantas terus mentradisi secara turun-temurun. Kesuksesan Revolusi Komunis pada 1949 yang berdampak pada kepindahan pemerintahan Nasionalis dari Beijing ke Taipei juga tidak lantas menghilangkan perasaan tidak suka tersebut. Meskipun dalam perkembangannya, pemerintahan Nasionalis di Taipei berhasil mendorong kemajuan ekonomi Taiwan, tetapi hal itu tetap tidak meredupkan keinginan untuk memisahkan diri dari China Daratan.

Pendudukan Jepang selama 50 tahun (1895-1945) memang telah berdampak buruk pada hubungan Taiwan dengan China. Meskipun sempat bersatu selama empat tahun (1945-1949), tetapi Revolusi Komunis mengakibatkan disintegrasi kembali terjadi. Intervensi AS sejak 1950 semakin memperparah disintegrasi itu, menurut Wang (2006) dalam Mubah (2014). Dengan bantuan AS, pemerintahan Nasionalis mulai membangun

perekenomian dan mengembangkan sistem demokrasi Taiwan. Di kala China mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tetap bertahan dengan sistem komunisnya, Taiwan merasakan perkembangan ekonomi yang pesat dan tumbuh menjadi negara yang semakin demokratis.

Hal ini disebabkan karena Taiwan menerapkan sistem ekonomi dan politik yang serupa dengan AS. Tidak hanya itu, AS juga membantu kekuatan persenjataan dalam jumlah besar ke Taiwan untuk mengantisipasi ancaman yang diberikan Tiongkok. Perdagangan senjata antara Amerika Serikat dan Taiwan ini terus terjalin, hingga pada saat persoalan status kenegaraan Taiwan mulai dipertanyakan, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada saat upaya reunifikasi tersebut, Amerika Serikat menunjukkan perannya sebagai negara pelindung Taiwan (Ramadhani & Tjarsono, 2018).

Sedangkan bagi China, Taiwan adalah pulau yang hilang. Berbagai peperangan di masa lampau menjadikan Taiwan berulang kali mengalami integrasi sekaligus disintegrasi dengan China. Para pemimpin China percaya bahwa bersatunya kembali Taiwan dengan China akan membuat negara ini semakin besar dan kuat. Karena itu, unifikasi Taiwan dengan China menjadi impian besar yang terus ingin dicapai oleh para presiden Negeri Tirai Bambu ini, termasuk Hu Jintao dan Xi Jinping. Dalam peringatan satu abad Revolusi Nasionalis yang meruntuhkan pemerintahan monarki di Beijing pada 10 Oktober 2011, Hu mengatakan kepada Taipei Times (2011) dalam Mubah (2014): *"China and Taiwan should end antagonisms, heal wounds of the past and work together to achieve the great rejuvenation of the Chinese nation. Achieving reunification by peaceful means best serves the fundamental interests of all Chinese, including our Taiwan compatriots."* Dua tahun kemudian, Xi yang menggantikan Hu sebagai presiden menegaskan keinginan unifikasi karena *"both sides of (Taiwan) strait are family"*, yang dikutip dari Taipei Times (2013) oleh Mubah (2014). Salah satu wujud dari unifikasi oleh China bisa dilihat dari kebijakan *One China Policy*.

Pada tahun 1990 hingga 2008, dinamika politik korosif mendominasi hubungan politik Tiongkok dan Taiwan. Pada saat itu, kedua negara tersebut saling menaruh curiga dan masing-masing mempersiapkan berbagai cara mewujudkan kepentingannya. Dasar dari konflik Tiongkok dan Taiwan di antaranya adalah; pertama, adanya keengganan Presiden Tsai dalam menerima konsensus 1992. Yang mana telah disebutkan pada konsensus tersebut bahwa hanya ada satu Tiongkok melalui kebijakan *One China Policy*. Kedua, adanya perang sipil yang masih belum berakhir secara resmi. Hal ini terjadi karena pemerintah Tiongkok tidak mengakui pemerintahan di Taiwan. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga tidak memenuhi syarat dalam hubungan negara ke negara. Isu-isu berkaitan dengan Taiwan mendapat posisi penting bagi Tiongkok ketika mengetahui ada keterlibatan Amerika Serikat (Dewi & Dewi, 2018).

Tiongkok berharap Amerika Serikat tetap mematuhi adanya prinsip *One China Policy* begitupun dengan Taiwan yang harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok. Kebijakan *One China Policy* mendapat reaksi negatif dari Taiwan, karena Taiwan tidak berkeinginan bergabung dengan Tiongkok. Taiwan menganggap negaranya telah berdaulat secara *de facto* dan sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara. Walaupun Taiwan memberikan reaksi negatif, Tiongkok tetap menjalankan kebijakan *One China Policy* dengan membuat aturan ketat bagi negara

yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok; yang mana negara-negara tersebut tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan Taiwan. Dengan kata lain, dalam *One China Policy* ini negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut dan hanya memilih satu pemerintahan saja apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok (Dewi & Dewi, 2018).

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen diangkat menjadi presiden pertama perempuan di Taiwan. Pada saat pemilu terjadi, Tiongkok terus memantau hasil pemilihan presiden sehingga terdapat penolakan dari Tiongkok atas adanya pemilu yang diselenggarakan. Tiongkok tetap berusaha mengatakan bahwa urusan Taiwan merupakan urusan internal bagi Tiongkok. Sehingga Tiongkok menegaskan kembali adanya konsensus 1992 yang harus dihormati. Presiden Tsai Ing-wen terus berupaya mendorong kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Tiongkok sendiri tetap teguh pada klaimnya mengenai Taiwan meski negara ini sudah lebih dari 70 tahun memiliki pemerintahan sendiri, Tiongkok masih bersikeras bahwa kedua belah pihak berada pada satu bendera, namun Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak hal tersebut (Dewi & Dewi, 2018).

Kondisi dari kebijakan Tiongkok yang ofensif tentunya membuat Taiwan harus menemukan berbagai strategi demi mempertahankan kepentingan dan eksistensinya. Oleh karena itu, berdasarkan dinamika seperti yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu; bagaimana strategi aliansi pemerintah Taiwan dalam menghadapi ancaman dari China tahun 2018?

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan pertama berjudul "*Strategi Pemerintahan Xi Jinping Terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok*" yang ditulis oleh Inneka Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi dalam jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.2 tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan Strategi Xi Jinping dalam mengamankan kedaulatan Tiongkok terhadap Taiwan dapat dilihat dari tiga sektor keamanan yang diajukan oleh Buzan dkk. yaitu sektor militer, sektor politik, dan sektor ekonomi. Dari ketiga klasifikasi tersebut dapat dipetakan strategi mana yang berhasil dan yang dianggap kurang efektif dalam mempertahankan kedaulatan Tiongkok terhadap Taiwan (Dewi & Dewi, 2018).

Dalam strategi sektor militer dan sektor politik untuk mengatasi ancaman dari posisi Taiwan hingga saat ini dapat dikatakan masih mampu membuat Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok, atau setidaknya mempertahankan status quo di mana Taiwan tidak mengambil tindakan ekstrem untuk membebaskan diri dari Tiongkok. Sedangkan, pada strategi sektor ekonomi, sebagian upaya oleh Tiongkok berhasil dan yang lainnya mengalami kegagalan karena sampai saat ini Taiwan masih berusaha keras agar perekonomiannya tidak bergantung pada Tiongkok. Tulisan ini mampu memberikan informasi penting terkait sejauh apa Taiwan dapat menjadi ancaman bagi Tiongkok, khususnya ketika dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Adapun perbedaannya terletak pada fokus negara yang dibahas, dimana tulisan tersebut membahas strategi Tiongkok, sedangkan tulisan ini membahas strategi yang dilakukan oleh Taiwan.

Tulisan kedua berjudul "*Kajian Historis atas Kompleksitas isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat*" yang ditulis oleh A. Safril Mubah dalam Research Gate. Adapun hal yang dibahas yakni perbedaan pandangan isu Taiwan oleh dua negara besar; AS dan China. Secara historis, China menganggap Taiwan sebagai

bagian integral dari wilayahnya. Namun, disintegrasi yang sempat dialami Taiwan membuat sebagian rakyat Taiwan tidak merasa sebagai bagian dari China. Situasi itu dimanfaatkan oleh AS yang mulai melancarkan intervensi sejak 1950-an. Akibatnya, wilayah Taiwan menjadi arena pertarungan China dan AS yang saling berebut pengaruh regional. Berdasarkan *Taiwan Relations Act* (1979), AS terus menjual senjata ke Taiwan selama tiga dekade. Sesuai dengan *Cross-Strait Service Trade Agreement* (2013), China berinisiatif membuka pasar bebas dengan Taiwan (Mubah, 2014).

Tak pelak, ketegangan di antara kedua negara kerap terjadi. Tetapi, demi menjaga stabilitas kawasan, China dan AS menahan diri agar tidak meningkatkan eskalasi menjadi konflik terbuka yang berujung perang. Karena itu, dapat dikatakan bahwa relasi kedua kekuatan global tersebut disharmonis dalam keharmonisan. Adapun perbedaannya dengan tulisan ini terletak pada focus kajian yang dibahas, dimana tulisan oleh A. Safril Mubah lebih banyak membahas konteks sejarah, sedangkan tulisan ini akan banyak membahas strategi Taiwan dalam menghadapi ancaman dari China, khususnya ancaman keamanan. Meskipun begitu, tulisan tersebut mampu memberikan informasi penting terkait sejarah Taiwan, China dan AS dalam dinamika konflik yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang artinya penulis menampilkan beberapa fakta yang terdapat dari beberapa sumber, seperti mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian dianalisis. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menguasai peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku dan tanggapan secara efektif dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata pada konteks yang terkhusus oleh alamiah, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang mendalam sehingga berbentuk penjabaran (Moleong, 2016, p. 6). Teknik untuk pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yang mengolektif informasi dari bermacam-macam sumber, seperti buku, jurnal, artikel, media massa, berita, dan internet yang sesuai dengan topik yang diteliti dan yang akan dibahas.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini secara umum akan menangkap informasi tentang peristiwa utama yang dikaji dalam penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu sekunder yang didapatkan dan diolah kembali oleh penulis dari berbagai bacaan yang masih terdapat berhubungan dengan fenomena yang diteliti, menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai pernyataan yang relevan. Kemudian, hasil uraiannya akan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP BANDWAGONING

Bandwagoning merupakan sebuah konsep dalam keamanan yang menekankan strategi aliansi dengan kondisi Ketika sebuah negara gagal membendung ancaman yang diterima, maka negara tersebut akan bergabung dengan negara terkuat untuk mendapatkan perlindungan. Hal inilah yang dilakukan Taiwan dimana negara tersebut memutuskan untuk merapat kepada AS dan mempererat aliansi pertahanan demi menghadapi ancaman kebijakan *One China Policy* yang semakin mengancam

keamanan Taiwan. Dalam tatanan hierarki politik, para aktor cenderung merapat ke kekuatan terdekat agar keamanan mereka tetap terjamin. Para bandwagon berusaha meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian mereka dengan berada di pihak yang lebih kuat dimana kekuatan dari pihak negara besar dapat melindungi bandwagon seperti Taiwan.

Dalam hal ini, negara yang lemah secara keamanan memiliki sedikit pilihan, menebak dan berharap bahwa mensejajarkan diri dengan pihak yang lebih kuat akan membawa dampak yang baik. *Bandwagon* memiliki tujuan untuk menarik keuntungan absolut dengan berbagi kemenangan dengan negara kuat. Konsep ini sendiri identic dengan peningkatan militer. Hal ini sesuai dengan peristiwa adanya bantuan militer AS ke Taiwan seperti penjualan senjata AS ke Taiwan, adanya *Taiwan Relations Act* (TRA) yang berisi perjanjian pertahanan dan militer dan menjadi tonggak utama komitmen AS yang konsisten mempertahankan eksistensi dalam menyediakan pertahanan keamanan untuk Taiwan(Syafiq, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

STRATEGI PERTAHANAN TAIWAN TERHADAP ANCAMAN CHINA

Ketika kaum nasionalis kalah dengan kaum Komunis saat perang saudara tahun 1940-an, China sudah menyatakan kedaulatan Taiwan yang saat itu kaum nasionalis memisahkan diri ke suatu pulau sejauh 160 km dari China. Sejak itu, pemerintah Komunis berusaha untuk menyatukan kembali untuk mengedepankan masa depan negara yang lebih memilih hukum perdamaian. Saat Tsa Ing-wen menjabat sebagai presiden di Taiwan tahun 2016, hubungan kedua wilayah tersebut memburuk karena dukungan partai politik tempat Tsa Ing-Wen, Partai Progresif Demokrat memandang buruk Negara China. Akibat dari hal tersebut, China menyatakan bahwa telah mengurangi wisatawan ke Taiwan belakangan ini selama lima tahun. Di sisi lain, China berusaha membujuk diplomatik Taiwan untuk berdamai dan bersatu kembali dengan cara mengupayakan hubungan diplomasi dan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Taiwan pada tahun 2017.

Tsai Ing-Wen Presiden Taiwan menekankan bahwa Taiwan tidak membutuhkan pertikaian militer, mereka hanya perlu membangun hubungan yang tenang, stabil, dan umumnya saling membantu. Meskipun demikian, jika pemerintah yang demokrat dan gaya hidup Taiwan dikompromikan, Taiwan dengan tegas mengatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga diri(CNN Indonesia, 2021b). Taiwan tidak akan takut pada ancaman militer dari China. Dalam strategi pertahanan menghadapi China, Taiwan meminta bantuan dari negara lain(Tempo, 2021). Menteri Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa selain mendapatkan bantuan keamanan dari AS, Taiwan juga akan dibantu oleh Australia yang merupakan sekutu AS untuk meningkatkan kolaborasi penjagaan dan perdagangan wawasan melawan China(CNN Indonesia, 2021c).

Hubungan Taiwan dengan Australia sangat baik, dimana Australia sendiri juga secara serius mendefinisikan sebuah metodologi untuk membendung dampak China di wilayah tersebut. Terakhir kali, Australia menjadi perhatian masyarakat global karena membangun partisipasi upaya perlindungan dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui persetujuan AUKUS. Dari persetujuan tersebut menghasilkan sebuah kapal selam

bertenaga nuklir yang akan dibangun oleh Australia dengan menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris. AUKUS sendiri merupakan sebuah akronim Bahasa Inggris untuk tiga negara anggota (Australia, United Kingdom, United States) yang merupakan sebuah pakta keamanan trilateral antara 3 negara tersebut dimana AS dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir. Pakta ini sendiri dibuat untuk melawan pengaruh China di Kawasan Indo-Pasifik yang semakin menguat. Dengan pakta ini juga, melalui Kerjasama keamanan yang baik antara Australia dengan 3 negara dalam AUKUS yang seluruhnya mendukung Taiwan, maka AUKUS akan melindungi Taiwan dari ancaman keamanan China.

Baru-baru ini pada tanggal 15 Juni 2021, China mengirim 28 pesawat yang berisi pesawat tempur dan pelontar bom nuklir Angkatan Udara China untuk memasuki wilayah pertahanan Taiwan atau bisa disebut Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Taiwan memerintahkan untuk menerbangi pesawat tempurnya sekaligus mengerahkan sistem rudal dengan alasan memperingatkan dan memantau pesawat-pesawat dari China (CNN Indonesia, 2021a). Lalu, Taiwan mengetahui Pesawat yang dikerahkan oleh China tidak hanya terbang di wilayah yang dekat dengan Kepulauan Pratas, tetapi terbang juga di sekitaran wilayah bagian selatan Taiwan yang mengerahkan sebagian pesawat tempur dan pesawat yang membawa pelontar bom (CNBC Indonesia, 2022). Namun dalam defensi Taiwan terhadap China juga ada titik lemahnya yang membuat kemungkinan besar China dapat merebut Taiwan. Hal itu dapat terjadi jika Amerika Serikat berhenti memberikan dukungan terhadap Taiwan. Diketahui memang selama bertahun-tahun mendapat dukungan dari Amerika Serikat dibidang teknologi maupun dibidang pertahanan lainnya.

Amerika Serikat mentransfer peralatan kebutuhan militer dengan jumlah yang besar ke Taiwan untuk menghalangi ancaman bahaya dari China. Misalnya, AS telah menyetujui penjualan senjata militer ke Taiwan dengan biaya sekitar 108 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,6 triliun (Berty, 2022). Ini adalah penjualan senjata kelima yang dilakukan sejak Presiden Biden menjabat, dan penjualan senjata keempat yang diumumkan pada tahun 2022 (Taiwan Today Indonesia, 2022). Tindakan tersebut memperlihatkan perhatian besar Pemerintah AS terhadap kebutuhan pertahanan keamanan nasional Taiwan, dan merupakan kelanjutan terhadap kebijakan normalisasi penjualan senjata kepada Taiwan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Penjualan senjata tersebut terus berjalan sampai pada saat dipertanyakan soal status kedaulatan Taiwan yang tidak diakui oleh global sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pada saat itulah, Amerika Serikat memperlihatkan perannya sebagai negara pelindung Taiwan (Ramadhani & Tjarsono, 2018). Amerika Serikat dan Taiwan menjadi erat karena terdapat ikatan dalam undang-undang yang membahas bidang persenjataan dan keamanan (Taiwan Relations Act). Salah satu inti dari undang-undang tersebut yakni perjanjian AS untuk mengekspor senjatanya ke Taiwan (Kompas, 2017). Hal itu membuat Taiwan merasa aman karena kelengkapan persenjataan militer AS yang canggih dan lengkap dapat menjadi counter untuk melawan dominasi keamanan dari China (Darmawan & Jamaan, 2015).

ALASAN CHINA INGIN MEMPERSATUKAN TAIWAN KEMBALI

Menurut China, Gerakan Taiwan dianggap terlalu bebas untuk melakukan kerja sama yang mengakibatkan munculnya ancaman untuk negara China. Ancaman yang dirasakan China, yaitu antara lain: pertama, karena alasan kedaulatan. Selama ini china selalu menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya. Kedua karena alasan geopolitik dimana hubungan antara Taiwan dengan Amerika Serikat sangat erat, dalam hal ini AS selaku rival China memberikan perlindungan kepada Taiwan yang sudah jelas bagi China sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Ditambah lagi persoalan Kerjasama antara AS dan Taiwan yang semakin membuat gerah China karena dengan adanya kerjasama persenjataan tersebut, China semakin merasa terancam dengan keberadaan persenjataan AS yang lengkap di Taiwan, mengingat lokasi Taiwan sendiri sangat dekat dengan China(Darmawan & Jamaan, 2015). Amerika Serikat membantu Taiwan untuk membuat China gelisah karena kekuatan dan perlengkapannya membawa Taiwan akan merasakan aman dan percaya diri untuk mempertahankan negaranya, sehingga China dalam mempersatukan kembali Taiwan akan sulit jika Taiwan memiliki kekuatan yang lebih besar dari China(Ramadhani & Tjarsono, 2018).

Kedua, upaya keras Taiwan untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat semakin berdampak pada China. Buzan dkk. Menyatakan tanggapannya bahwa salah satu resiko pada bidang ini adalah terdapat antipati pengakuan kedaulatan(Buzan et al., 1998). Hal ini membuat Taiwan tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena Taiwan menganggap bahwa wilayah mereka bukan bagian dari negara China yang dikuasai oleh kaum komunis, sehingga Taiwan bersusah payah untuk dianggap sebagai negara yang berdaulat oleh negara lain. Dalam ambisinya Taiwan berupaya semaksimal mungkin agar dapat masuk menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ambisi tersebut bukan hanya dalam pemerintahan Tsa Ing-Wen saja, melainkan sebelum pemerintahan Tsa Ing-Wen pun melakukan hal yang persis dilakukannya(Ponniah, 2017).

Ketiga, Taiwan adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan dan pertahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan Asia, sehingga di antara Amerika Serikat dan China Ingin saling memperkuat pengaruhnya di Negara Taiwan, karena menurut China, Taiwan memiliki potensi yang bisa menyimpan banyak kapasitas ekonomi yang dapat dikembangkan dan daerah yang cukup subur. Perekonomian di Negara Taiwan bisa tumbuh secara cepat karena adanya sumber daya manusia yang memadai. Dengan menguasai Taiwan, maka China juga dapat menguasai lebih banyak sektor ekonomi kuat yang dijalankan oleh Taiwan itu sendiri. Oleh sebab itu, China berusaha agar Taiwan bisa bersatu karena perekonomian Taiwan yang sangat kuat. Bila Taiwan dapat bersatu dengan China, akan megembangkan kapasitas serta membuat perekonomian jauh lebih kuat. Memiliki kekuatan ekonomi serta keamanan yang kuat tentu sangat diinginkan oleh China yang mana ini berusaha dicegah oleh AS dengan mendukung Taiwan sebagai negara yang merdeka(Saragih, 2018).

KESIMPULAN

Semenjak China dan Taiwan terpisah sejak tahun 1912-hingga saat ini Taiwan masih berpegang teguh untuk tidak bersatu kembali dengan China. Taiwan akan terus memperkuat pertahanan meskipun serangan dari China terus menerus digencarkan untuk menyerang negaranya. Strategi yang dipersiapkan Taiwan untuk memperkuat pertahanannya dalam mengamankan kedaulatannya terhadap China dibantu oleh Negara Amerika Serikat yang disebut dengan negara pelindung Taiwan. Dimana Amerika Serikat memberikan perlengkapan militer yang canggih kepada Taiwan untuk mengamankan wilayahnya dari ancaman yang berlangsung yaitu China. China merasa cemas karena Taiwan dibantu oleh Amerika Serikat yang dimana kelengkapan militernya diatas kecanggihan Negara China. Kemungkinan militer Taiwan bisa lebih canggih dari Negara China yang akan mempersulit China mengambil wilayah yang dikuasai oleh Taiwan.

Menurut penulis, negara China tidak akan berhenti dengan alasan Negara Taiwan sudah memperkuat sistem militernya yang disebut dengan modernisasi militer, karena China tidak ingin dianggap oleh negara lain sebagai negara yang lemah atau kalah akan Taiwan. Sebaliknya, Negara Taiwan pun tidak akan pasrah dan menyerahkan negaranya akan ancaman yang diperbuat oleh China. Prediksi Tsa Ing-Wen sebagai Presiden Taiwan memprediksi apabila China terus-menerus melakukan untuk mempersatukan negaranya, maka akan terjadi malapetaka. Dalam teori *offense-defense* dimata kuliah *security studies* peristiwa di atas termasuk ke dalam *security dilemma* yang pengertiannya suatu peristiwa antar dua negara atau lebih yang dimana tindakannya akan meningkatkan keamanannya atau akan melemahkan keamanan negaranya. Dengan kata lain, bila suatu negara memperkuat keamanannya akan mengancam negara lain, sebaliknya bila suatu negara tidak memperkuat atau melemahkan keamanannya ditakutkan akan terancam.

Perlu dicatat bahwa tulisan dalam jurnal ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan memungkinkan bahwa ancaman yang dialami oleh Taiwan terhadap posisi China yang sudah diungkapkan dalam jurnal ini tidak secara bulat yang melingkup secara komprehensif dengan mempertimbangkan konflik antara Taiwan dan China yang kompleks dan berkepanjangan. Oleh sebab itu, analitis dan deskriptif dengan faktor yang berbeda akan mungkin hasil kesimpulan yang berbeda, yang mengingat jurnal ini hanya fokus terhadap strategi Taiwan dalam mempertahankan wilayahnya terhadap negara China yang masih berusaha untuk mengambil wilayahnya kembali.

REFERENSI

- Berty, T. T. S. (2022, July 19). *China Murka AS Jual Senjata ke Taiwan Senilai Rp 1,6 Triliun*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/global/read/5018206/china-murka-as-jual-senjata-ke-taiwan-senilai-rp-16-triliun>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security : A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers Inc.
- CNBC Indonesia. (2022, June 22). *Pesawat China "Ugal-ugalan", Taiwan Kerahkan Jet Tempur*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220622065026-4-349159/pesawat-china-ugal-ugalan-taiwan-kerahkan-jet-tempur>
- CNN Indonesia. (2021a, October 5). *China Kerahkan 52 Pesawat Tempur ke Zona Pertahanan Taiwan*.

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004222034-113-703342/china-kerahkan-52-pesawat-tempur-ke-zona-pertahanan-taiwan>
- CNN Indonesia. (2021b, October 5). *Presiden Tsai Ing-wen: Malapetaka Jika Taiwan Jatuh*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211005121105-113-703528/presiden-tsai-ing-wen-malapetaka-jika-taiwan-jatuh-ke-china>
- CNN Indonesia. (2021c, October 5). *Taiwan Siap Perang Lawan China, Minta Bantuan Australia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211005064202-113-703368/taiwan-siap-perang-lawan-china-minta-bantuan-australia>
- Darmawan, F. E. B., & Jamaan, A. (2015). Dampak Kerjasama Militer Amerika Serikat-Taiwan Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Cina. *JOM FISIP Universitas Riau*, 2(2), 1–11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7518>
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2018). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.18196/hi.72136>
- Kompas. (2017, June 30). *AS Jual Senjata 1,4 Miliar Dollar AS ke Taiwan, China Protes Keras*. <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/30/16473421/as.jual.senjata.1.4.miliar.dollar.as.ke.taiwan.china.protes.keras>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubah, A. S. (2014). Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat. *Jurnal Global Dan Strategis*, 8(2), 321–337. <http://journal.unair.ac.id/JGS@kajian-historis-atas-kompleksitas-isu-taiwan--dalam-hubungan-china-dan-amerika-serikat-article-10016-media-23-category-8.html>
- Ponniah, K. (2017, June 14). *Taiwan: How China Is Poaching The Island's Diplomatic Allies*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-40263581>
- Ramadhani, F., & Tjarsono, I. (2018). Dampak Kerjasama Perdagangan Senjata Amerika Serikat terhadap Peningkatan Ekonomi Taiwan. *JOM FISIP Universitas Riau*, 5(1), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17279>
- Saragih, H. P. (2018, February 18). *20 Negara dengan PDB Terbesar di Dunia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180218140126-16-4654/20-negara-dengan-pdb-terbesar-di-dunia>
- Syafiqa, A. (2016). *Aliansi Pertahanan Taian-Amerika Serikat dalam Menghadapi One China Policy Periode 2011-2014* [Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40492/2/ALVIA_SYAFIQA-FISIP.pdf
- Taiwan Today Indonesia. (2022, July 18). *Pemerintah AS Umumkan Penjualan Senjata Senilai USD 108 Juta untuk Taiwan*. <https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=463&post=222229>
- Tempo. (2021, October 4). *Menteri Luar Negeri Taiwan Mengatakan Negerinya Sedang Mempersiapkan Perang Melawan China dan Meminta Bantuan Australia*. <https://www.tempo.co/abc/7013/menteri-luar-negeri-taiwan-mengatakan-negerinya-sedang-mempersiapkan-perang-melawan-china-dan-meminta-bantuan-australia>